PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU BAJO MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA BUNGA KARANG DI DESA SANTIRI KECAMATAN TIWORO UTARA KABUPATEN MUNA BARAT

Harita¹, Juhaepa², Ambo Upe³

¹Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia

²Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia

³Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia

¹Email korespondensi: harita21@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explain how the process of empowering bajo people through business entities owned by the village of Santiri Village, North Tiworo District, West Muna Regency. This research is qualitative research. Data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The data sought is a type of data in the form of qualitative data and quantitative data sourced from primary data and secondary data, the examination of the validity of the data is carried out using triangulation techniques and using descriptive qualitative analysis techniques. The results showed that there is an empowerment process in Santiri Village through awareness, community organizing and resource delivery through Village Owned Enterprises. Thus, it can show that there is an empowerment process that can empower the community in Santiri Village, North Tiworo District, West Muna Regency.

Keywords: *process, empowerment, BUMDES*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana Proses Pemberdayaan Masyarakat Suku Bajo melalui Badan Usaha Milik Desa Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang dicari adalah jenis data berupa data kualitatif dan data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder, pemeriksaan keabsahan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat proses pemberdayaan di Desa Santiri melalui penyadaran, pengorganisasian masyarakat dan penghantaran sumber daya melalui Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian, dapat menunjukkan bahwa adanya proses pemberdayaan yang dapat meberdayakan masyarakat di Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat.

Kata-kata Kunci: *Proses, Pemberdayaan, BUMDES.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hasil dari pembangunan tersebut di harapkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, baik pada tatanan sosial, ekonomi maupun budaya. Namun sampai saat ini hasil dari pembangunan di Indonesia belum dapat menghilangkan kemiskinan secara merata. Untuk itu, diperlukan

pembangunan kesejahteraan sosial yang dimana merupakan serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditunjukkan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dapat dilakukan, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembangunan Desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan memanfaatkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.

Pendirian BUM Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUM Desa tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk itu dibutuhkan pula partisipasi dari masyarakat, dengan berpartisipasinya masyarakat pada pembangunan, akan menjembatangi keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Menurut definisi konseptual dari Davis Huraerah (2011) *“participation is defined as mental and emotional involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them”* (partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya).

Pada tahun 2017 Badan Usaha Milik Desa mulai terealisasi di Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat sebagai salah satu program dari Pemerintah Pusat dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa, mendorong pengelolaan pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Badan Usaha Milik Desa yang terealisasi oleh Desa Santiri yaitu sebagai berikut : Unit Usaha Air Bersih, Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Suasembada Ikan dan Unit Usaha Hasil Laut (Perikanan). (BUMDES Desa Santiri, 2015)

Berdasarkan realita yang ada di Desa, BUM Desa “Bunga Karang” dibentuk dengan mempertimbangkan : Inisiatif Pemerintahan Desa dan/atau masyarakat Desa Santiri; Potensi Ekonomi Desa santiri; Sumber Daya Alam Desa Santiri; Sumber Daya Alam Manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan Penyertaan modal dari Pemerintahan Desa. Dengan pertimbangan tersebut akan memudahkan pemberdayaan masyarakat Suku Bajo. Sehingga pemberdayaan melalui BUM Desa “Bunga Karang” berupa Unit Usaha Air Bersih berupa penjualan air bersih, Unit Usaha Simpan Pinjam berupa pemberian pinjaman untuk usaha, Unit Usaha Suasembada berupa perdagangan umum meliputi perdagangan sembako, perabotan rumah tangga, jual beli pakaian, dan Unit Usaha Hasil Laut (Perikanan) misalnya kepiting, teripang, lobster dan ikan, akan mendukung penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki agar masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hasil studi atau hasil penelitian yang terkait dengan suku Bajo, nelayan Bajo, maupun pemberdayaan nelayan suku Bajo, sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik peneliti local maupun peneliti nasional dan internasional. Diantara hasil studi tentang pemberdayaan pemberdayaan nelayan suku Bajo antara lain dilakukan oleh (Chandra et al., 2020; Tuwu et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka menarik penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Suku Bajo Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat, yang merupakan salah satu Desa di Muna Barat yang dikenal dengan sebutan Pulau Balu. Pertimbangan penelitian ini dilakukan di Desa Santiri karena ada program Badan Usaha Milik Desa yang terlaksana pada tahun 2017 sebagai upaya kesejahteraan masyarakat, yang dinamai BUM Desa “Bunga Karang”, dimana penamaan ini telah disepakati berdasarkan musyawarah bersama. Teknik penentuan informan ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu suatu teknik penentuan informan secara disengaja dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk memperoleh data atau informasi yang didasarkan ciri-ciri, sifat, atau karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan. Karakteristik atau kriteria penentu informan yang dilakukan dalam penelitian yaitu pihak-pihak yang terkait dalam BUM Desa “Bunga Karang”.

Data kualitatif yang disajikan berupa deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan dokumen resmi lainnya yang erat hubungannya dengan topik dari penelitian ini dan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk tabel yaitu mengenai data monografi Desa Santiri Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat yang merupakan himpunan data yang dilaksanakan oleh desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, terpadu dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek. Untuk melengkapi data, akan dilakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan sebagai alat pengumpulan data. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh disajikan dalam bentuk penjelasan, uraian, dan menggambarkan kondisi atau kenyataan yang sesungguhnya mengenai pemberdayaan masyarakat Suku Bajo melalui Badan Usaha Milik Desa

PEMBAHASAN

Profil BUMDesa Bunga Karang Desa Santiri

Desa Santiri merupakan salah satu wilayah Desa di Kecamatan Tiworo Utara Kabupaten Muna Barat yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 480 KK atau 1920 jiwa dengan komposisi penduduk suku bajo 1880 jiwa dan suku lainnya 40 jiwa, memiliki jumlah rumah sebanyak 395 unit. Secara administrasi Desa Santiri disebut Pulau Balu berada dalam Kecamatan Tiworo Utara, dengan batasan-batasan sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tiga; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tondasi; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lakabu; Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maginti. Luas wilayah Desa Santiri kurang lebih 277,15 Ha, dengan panjang garis pantai 4,86 Km yang terdiri dari tiga wilayah dusun yakni Dusun I memiliki II RT, Dusun II memiliki IV RT, dan Dusun III memiliki VI RT.

Kondisi topografi wilayah ini merupakan daerah tanah datar dengan ketinggian kurang lebih 2 m di atas permukaan laut dan sebagian besar daerahnya merupakan pinggir pantai sehingga kapasitas penduduk di Desa Santiri banyak berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya hasil laut (lobster, ikan, kepiting rumput laut, teripang dan

lain sebagainya) untuk menghidupi keluarganya. Desa Santiri memiliki luas tanah kering kurang lebih 4 Ha, dan tanah basah luasnya kurang lebih 2620 Ha. Masyarakat Desa Santiri seluruhnya beragama Islam. Suku yang dominan pada Desa Santiri adalah Suku Bajo sebanyak 1880 Orang. Untuk mendukung aktivitas penduduk di Desa Santiri sarana dan prasarana yang terdapat yaitu Masjid 1(satu) buah, Mushola 1(satu) buah, tambatan perahu 1(satu) buah, Balai Desa 1(satu) buah, Puskesmas dan Pustu.

BUMDesa Desa Santiri didirikan pada Tahun 2015 berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh masyarakat serta unsur lain yang terkait yaitu unsur pimpinan rapat dan narasumber. Kegiatan musyawarah ini dilaksanakan pada Hari Sabtu, 10 Januari 2015.

Berdasarkan hasil wawancara (Wawancara pada tanggal 24 September 2017), yang dilakukan kepada Pak Samsul selaku Sekretaris Desa Santiri menyatakan bahwa: Visi dari BUMDesa “Bunga Karang” yaitu menstabilkan pemberdayaan masyarakat untuk meminimalisir kemiskinan masyarakat Suku Bajo Desa Santiri. Adapun Misi dari BUMDesa Bunga Karang yaitu:

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Meningkatkan usaha masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan juga pendapatan Asli Desa;
4. Mengelola dana program desa bersifat dana bergulir untuk meminimalisir kamiskinan masyarakat.

Putra (2015), BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa. Adapun tujuan dari BUMDesa “Bunga Karang” (Pasal 5 dalam Peraturan Desa Santiri, Nomor: 5, Tahun 2015):

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kerjasama masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Sasaran dari BUMDesa “Bunga Karang” (Pasal 6, dalam Peraturan Desa Santiri, Nomor: 5, Tahun 2015) adalah:

- a. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di Desa;
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat Desa dalam mengembangkan usahanya;
- c. Membina masyarakat dalam mengembangkan dan mengelola usahanya; dan
- d. Membantu masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di Desa.

BUMDesa “Bunga Karang” memiliki fungsi sebagai berikut (pasal 8 dalam Peraturan Desa Santiri, Nomor:5, Tahun 2015):

- a. Sebagai saran perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan; dan
- b. Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat.

Dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDesa yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Subtansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelloan BUMDesa. Adapun tugas dan tanggung jawab pengurus BUMDesa Desa Santiri, yaitu:

- a. Penasihat: Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa, memberikan saran dan pendapat mengenai msalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa. Selain itu juga penasihat memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persolan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa dan melindungi Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.
- b. Pelaksana Operasional: Adapun tugas dari pelaksana operasional yaitu mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana operasional mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau palayanan umum masyarakat Desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. Selain itu, pelaksana operasional mempunyai wewenang membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUMDesa setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan, dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMdesa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun.

- c. Pengawas: Adapun tugas dari pengawas yaitu mewakili kepentingan masyarakat. Pengawas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan rapat umum, membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya setahun sekali. Pengawas mempunyai wewenang untuk pemilihan dan pengangkatan pengurus, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan operasional.
- d. Ketua Unit Usaha: Ketua unit usaha bertanggung jawab kepada ketua BUMDesa atas terlaksananya usaha kerjasama. Adapun tugas dari ketua unit usaha yaitu membantu BUMDesa memperoleh Dana diluar Dana BUMDesa dengan lebih mengoptimalkan fasilitas BUMDesa guna membantu kesejahteraan masyarakat, dan menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan unit usaha secara berkala.

Unit dan Kegiatan BUMDesa Bunga Karang Desa Santiri

a. Unit Usaha Air Bersih

Adapun kegiatan yang dilakukan pada unit usaha ini yaitu: penjualan air bersih. Masyarakat yang menjadi anggota dari unit usaha ini ada 7 orang, mereka adalah masyarakat yang memang pada dasarnya berprofesi sebagai penjual air. Selanjutnya sebagian dari mereka mengambil modal dari BUMDesa Desa Santiri untuk mengembangkan usaha penjualan air mereka dengan menambah sarana dan prasarana untuk penampungan air dan sebagian dari mereka menyerahkan sepenuhnya untuk kemudian BUMDesa lah yang menyalurkan pada semua masyarakat.

Unit usaha ini sangatlah berpotensi dalam masyarakat karena semua masyarakat membutuhkan air bersih, yang sebelumnya sangat kekurangan air bersih dan keterbatasan perolehan air bersih dalam masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana dari mereka yang berprofesi sebagai penjual air. Dengan adanya BUMDesa Desa Santiri, masyarakat tidak lagi merasakan kesulitan air bersih dan tidak terlalu banyak mengularkan uang untuk memperoleh air bersih. Selain itu juga keuntungan diperoleh mereka yang berprofesi sebagai penjual air bersih yang menjadi anggota dari unit usaha ini, karena keuntungan yang diperoleh lebih baik dari pada sebelumnya. Begitu juga BUMDesa Desa Santiri memperoleh keuntungan sendiri sebagai tambahan untuk Pendapatan Asli Desa.

b. Unit Usaha Simpan Pinjam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketua unit usaha ini yaitu saudari Darmin bahwa kegiatan yang dilakukan pada Unit Usaha ini yaitu masyarakat yang membutuhkan modal, diberi pinjaman dari BUMDesa untuk mengembangkan

usahanya sendiri. Selain itu juga masyarakat dapat menyimpan uang mereka sebagai penyertaan modal BUMDesa yang nantinya keuntungan dari unit usaha ini akan dirasakan juga oleh mereka yang menyertakan modalnya di unit usaha ini. Jumlah dari anggota unit usaha ini yaitu 13 orang.

c. Unit Usaha Suasembada

Berdasarkan perolehan data dilokasi, kegiatan yang dilakukan dalam unit usaha ini berupa Perdagangan Umum yaitu melakukan penjualan Sembako, pakaian, dan alat-alat rumah tangga. BUMDes menyediakan sarana dan prasarana bagi anggotanya untuk disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan guna menstabilkan kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Jumlah anggota dari unit usaha ini 6 orang dan anggota dari unit ini adalah warga yang memang pada dasarnya berjualan pakaian, sembako dan alat-alat rumah tangga yang diperoleh dari tangan ke tangan, kemudian unit usaha ini menyediakan bahan perdagangan yang diperoleh dari tempat-tempat yang diperkirakan lebih murah agar nantinya diperjual belikan pada masyarakat dengan harga lebih rendah dari harga sebelumnya yang disediakan.

d. Unit Usaha Hasil Laut

Berdasarkan pengamatan sebelumnya (tanggal 29 September samapi 2 Oktober) dan data-data yang mendukung dari lokasi diketahui bahwa hasil laut di Desa Santiri sangat melimpah oleh karena itu BUMDesa menyediakan program Unit Usaha ini untuk pengelolaan Hasil Laut, mulai dari pembudidayaannya sampai dengan penjualan Hasil Laut. Selain itu juga unit usaha ini menjadi mitra penghubung antara pengelola dan pengusaha yang akan menampung Hasil Laut yang dikelola. Jumlah anggota dari unit usaha ini sudah mencapai 283 jiwa, karena memang pada dasarnya mereka adalah nelayan yang bukan hanya menghasilkan ikan tapi juga hasil laut lainnya.

Sebelumnya, masyarakat menjual hasil laut yang diperoleh pada tengkulak-tekulak dengan harga yang sangat murah sehingga pendapatan masyarakat sangatlah minim. Dengan adanya unit usaha ini, masyarakat dapat menyalurkan hasil laut yang diperoleh maupun dibudidayakan pada BUMDesa untuk kemudian dipasarkan. Selain itu juga BUMDesa Desa Santiri membangun kerjasama dengan pihak ketiga dari Desa lain, misalnya Desa Tasipi, Desa Bero, Desa Tiga dan lain sebagainya untuk menambah pendapatan Asli Desa. Kerjasama yang dilakukan berupa jual beli hasil laut.

Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Santiri Melalui Badan Usaha Milik Desa Bunga Karang

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati. Sutarto dalam Cholisin (2011). Adapun proses pemberdayaan melalui program BUMDesa yang dilakukan pemerintah Desa Santiri, yaitu:

a. Penyadaran

Nazirman (2012) mengemukakan bahwa penyadaran menunjukkan manusia memiliki potensi mengambil atau tidak mengambil suatu tindakan. Seperti halnya Ohama (2006) menjelaskan penyadaran, untuk membenahi unsur norms (N) berupa pendampingan pemahaman potensi lokal, pemerataan swadaya penyusunan dan implementasi rencana, mentoring dan evaluasi dan refleksi pengalaman. Masyarakat nelayan ini diberi pemahaman tentang bagaimana memasarkan dan mengelola sebaik-baiknya sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat sebagai aset Desa yang bisa menambah penghasilan masyarakatnya juga Pendapatan asli Desa. “Selain itu juga masyarakat dijelaskan tentang kebutuhan yang kurang terpenuhi dalam masyarakat seperti air bersih yang bisa digunakan sebagai potensi dalam Desa”, tegas Pak Jamal selaku Kepala Desa Santiri (wawancara pada tanggal 29 September 2017). Hal ini merupakan salah satu bentuk penyadaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

b. Pengorganisasi Masyarakat

Murray dalam Suriadi (2005), menjelaskan bahwa pengorganisasian yaitu proses dengan mana suatu masyarakat menemukan kebutuhan-kebutuhan dan tujuannya adalah untuk menciptakan teoritis diantara kebutuhan-kebutuhan, juga menemukan sumber-sumber baik sumber informal (dari masyarakat sendiri) maupun sumber eksternal (dari luar masyarakat) agar masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan sikap-sikap dan praktek-praktek *cooperative* di dalam masyarakat. Sedangkan Ohama (2006) menjelaskan pengorganisasian masyarakat, untuk membenahi unsur Organization (O) berupa fasilitas pembentukan kelompok, pengembangan organisasi komunitas, pengembangan jaringan, pengembangan kolaborasi multipihak. Berdasarkan data

sekunder yang diperoleh dilokasi, bentuk pengorganisasian masyarakat dicantumkan dalam struktur organisasi kepengurusan BUMDesa “Bunga Karang”.

Mereka bergabung dalam kelompok unit usaha yang memang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh individu itu sendiri, kemudian ketua-ketua dari unit usaha ini membangun mitra usaha dengan Desa lain. Melalui mitra usaha ini kemudian hasil laut dari masyarakat diperjual belikan dan juga untuk memperoleh dana yang dapat mengembangkan unit usaha utamanya usaha hasil laut.”Pengelompokan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, dapat menggali potensi yang dimiliki oleh diri mereka. Dengan potensi itu mereka akan dapat mengembangkan perekonomian mereka sendiri.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDesa di Desa Santiri, dapat disimpulkan proses pemberdayaan yang berlangsung sebagai berikut:

1. Penyadaran dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat Desa Santiri. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman tentang strategi pemasaran dan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat sebagai aset Desa yang bisa menambah penghasilan masyarakatnya juga Pendapatan asli Desa. Selain itu, masyarakat dapat menyesuaikan diri mereka terhadap potensi yang dimiliki oleh individu tersebut dengan potensi yang berada diluar individu itu sendiri. Sehingga masyarakat bekerja sesuai dengan keahlian mereka sendiri melalui program dari tiap unit usaha yang telah disediakan dalam BUMDesa Desa Santriri.
2. Pengorganisasian Masyarakat, dengan pengorganisasian masyarakat untuk membenahi entitas pelaku yang mengelola sumberdaya tersebut berupa pembentukan kelompok melalui unit-unit usaha dalam BUMDesa untuk kemudian mampu mengelola potensi yang ada dan melalui BUMDesa inilah dibangunnya jaringan untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap dapat mengembangkan usaha yang sangat berpotensi dalam masyarakat seperti hasil laut, sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan peroleh hasil laut mereka.
3. Penghantaran Sumberdaya dilakukan melalui penyaluran modal dan peralatan kepada anggota setiap unit usaha BUMDES. Penyaluran tersebut disesuaikan dengan potensi Desa Santiri. Dengan sarana prasarana ini lah membantu mengembangkan program unit usaha yang telah ditetapkan BUMDesa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Y., Tuwu, D., & Supiyah, R. (2020). Pemberdayaan Nelayan Suku Bajo Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Mantigola Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 1(1), 11–19. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JKPS/article/view/10878>
- Cholisin. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. *Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011*.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Kurniawan, Luthf J. dkk. 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Nazirman. 2012. *Menumbuhkan Kesadaran Diri*. Padang: Penerapan Fungsi Terapeutik Layanan Konseling Islam di RSI Ibnu Sina Padang, (Tesis)
- Peraturan Desa Santiri No. 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.
- Putra, Surya Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Salman, Darmawan. 2005. “Pengembangan Otonomi Desa”. *Makalah Disampaikan dalam “Temu konsultasi Pengembangan Global Otoda dan Partisipasi Masyarakat” oleh YBM-FPPM-BPM Sulsel, Makasar, 11-13 Januari 2005*.
- Silalahmi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Tuwu, D., Upe, A., Tawai, A., & Supiyah, R. (2019). *Empowering Bajo Women in Managing Household Finances In Bajo Indah Village , Soropia District , Konawe Regency , Southeast Sulawesi*. <https://doi.org/10.4108/eai.26-1-2019.2283316>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Upe, Ambo. 2016. *Metode Penelitian Sosial Filosofi dan Desain Praktis*. Kendari: Literacy Institute.

Widayanti, Sri. 2012. Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 1, Nomor 1, 87-102.

Widjajanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, Nomor 1, 15-27.

Wirawan, Kadek Muriadi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Pada Aspek Kelembagaan Tradisional (Studi Kasus Pada Lembaga Desa Adat/Banjar dan Subak Di Desa Beraban Kabupaten Tabanan)*. Makassar: Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin.